

DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG,
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TASIKMALAYA

PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
**DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG,
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN,
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Raya Mangunreja - Sukaraja Km. 1,200 Telp : (0265) 548786 Fax : (0265) 548777
Website : dputrprkplh.tasikmalayakab.go.id e-mail : dputrprkplh@tasikmalayakab.go.id
Mangunreja - 46462

KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : RC.04.02/KEP.161/DPUTRLH/2023

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM,
TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, DAN
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan pasal 139 ayat (1), Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. Bahwa dalam rangka mengarahkan pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, maka perlu adanya Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2023;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2023 dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
 16. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

17. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup;
18. Surat Edaran Nomor 0030 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 Kabupaten Tasikmalaya;
19. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
20. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Nomor OT.05/Kep.11/DPUTRLH/2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Hal-hal yang perlu diatur lebih lanjut akan ditetapkan kemudian;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Mangunreja
Pada tanggal : 4 Juli 2023

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang,
Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Tasikmalaya



M. FUAD ABDUL AZIZ, S.T., M.P
Pembina Tk. I
NIP. 19660704 199303 1 004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023

Nomor : RC.04.02/KEP.161/DPUTRLH/2023

Tanggal : 4 Juli 2023

**Daftar Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja
Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2023**

Penanggung Jawab : M. Fuad Abdul Aziz, S.T., M.P

Ketua Tim : Drs. Asep Zamzam Nizar, M.M.

Anggota : - Kepala Bidang Jalan dan Jembatan
- Kepala Bidang Penataan Ruang
- Kepala Bidang Bangunan
- Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Kepala Bidang Sumber Daya Air
- Kepala Bidang Lingkungan Hidup
- Fungsional Perencana Ahli Muda
- Staff Pelaksana Sub Bagian PEP

Mengetahui/Menyetujui :
KEPALA DINAS PUTRLH
KABUPATEN TASIKMALAYA



M. FUAD ABDUL AZIZ, S.T., M.P

Pembina Tk. I

NIP. 19660704 199303 1 004

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya ini dapat diselesaikan sesuai dengan sistematika penyusunan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Kami sangat menyadari bahwa Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan Penyusunan agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023.

Semoga Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 bermanfaat bagi pembangunan di bidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya.

Tasikmalaya, Juli 2023



M FUAD ABDUL AZIZ S.T, M.P

Pembina Tk.I -IV/b

NIP. 19660704 199303 1 004

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	<i>i</i>
DAFTAR ISI	<i>ii</i>
DAFTAR TABEL	<i>iii</i>
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-4
1.3 Maksud dan Tujuan	I-7
1.4 Sistematika Penulisan	I-9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023	
2.1 Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	II-1
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II .	II-4
2.3 Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .	II-13
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	III-1
BAB IV PENUTUP	IV-1

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Jadwal dan Tahapan Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	I-3
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023	II-2
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya sd. Tahun 2022	II-3
Tabel 2.3 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun Berjalan sd. Triwulan II	II-4
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun Berjalan sd. Triwulan II	II-13
Tabel 3.1 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target Dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Tahun Berjalan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya	III-3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Rencana pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat daerah (OPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan RKPD dan Renja merupakan pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Perubahan terhadap dokumen perencanaan tersebut di atas dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan yang telah di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 343 Ayat (1) menyebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi

pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi : 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternative, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Perubahan Renja OPD harus menyesuaikan dengan dokumen Perubahan RKPD menjadi dokumen Perubahan Renja PD. Perubahan Renja PD juga harus menyesuaikan dengan Renstra PD. Selanjutnya Renja Perubahan PD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-P) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) yang kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan APBD Perubahan (APBD-P).

Perubahan Renja merupakan satu kesatuan proses yang tidak dapat dipisahkan dengan Perubahan RKPD. Sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017, tahapan dan jangka waktu penyusunan Renja Perubahan sangat ketat dan padat, sehingga perlu disusun matriks yang berisi tahapan dan calendar penyusunan Renja Perubahan OPD. Berikut adalah tabel tahapan RKPD Perubahan dan Renja Perubahan.

Tabel 1.1**JADWAL DAN TAHAPAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RKP
DAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

Uraian Kegiatan		Tanggal
Penyusunan Perubahan RKP Tahun 2023		
1	Evaluasi RKP s.d. Triwulan II Tahun 2023	19 Juni – 4 Juli 2023
2	Penyusunan Draft Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	
3	Input Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	5 – 12 Juli 2023
4	Verifikasi Rancangan Perubahan RKP Tahun 2023	5 - 12 Juli 2023
5	Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKP Tahun 2023	13 Juli 2023
6	Reviu Rancangan Akhir Perubahan RKP Tahun 2023 oleh APIP	14 Juli 2023
7	Perbaikan Hasil Reviu Rancangan Akhir Perubahan RKP Tahun 2023	Minggu ke-3 s.d ke-4 Juli 2023
8	Fasilitasi Perubahan RKP Tahun 2023 oleh Gubernur melalui Bappeda Provinsi Jawa Barat	Minggu ke-3 s.d ke-4 Juli 2023
9	Penyampaian Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKP Tahun 2023 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang Perubahan RKP Tahun 2023	Minggu ke-3 s.d ke-4 Juli 2023
10	Penetapan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKP Tahun 2023	Minggu ke-3 s.d ke-4 Juli 2023
Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		
1	Penyampaian Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah ke Bappelitbangda untuk Diverifikasi	Minggu ke-4 Juli 2023
2	Penyampaian Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah untuk Direviu APIP	Minggu ke-4 Juli 2023
3	Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah oleh Bappelitbangda	Minggu ke-4 Juli s.d. Minggu ke-1 Agustus 2023
4	Reviu Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah oleh APIP	Minggu ke-4 Juli s.d. Minggu ke-1 Agustus 2023
5	Perbaikan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Minggu ke-1 Agustus 2023
6	Penyampaian rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati	Minggu ke-2 Agustus 2023
7	Penetapan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023	Minggu ke-3 Bulan Agustus 2023

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Penanggungjawab Keuangan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Rencana Kegiatan Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Transisi Dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah;
28. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; dan
29. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 0030 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 Kabupaten Tasikmalaya.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 dimaksudkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu perubahan atas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat tahunan. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 sangat penting peranannya guna menampung perbaikan dan/atau perubahan belanja prioritas yang belum terakomodir dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023.

Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 tetap menjadi bagian utuh dari upaya pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 memuat dasar pertimbangan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan sampai dengan triwulan kedua dan perubahan atas program dan kegiatan yang harus dilakukan pada tahapan pembangunan Tahun 2023.

Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 ditujukan sebagai pedoman atau acuan terhadap arah penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Secara sistematis, tujuan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan

Hidup Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) merumuskan perbaikan dan penyesuaian terhadap perkembangan keadaan, yang meliputi : 1) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, dan penyesuaian terhadap rencana program dan kegiatan RKPD; dan/atau 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternative, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
- 2) merumuskan program dan kegiatan untuk dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) yang kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan APBD Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2023;
- 3) Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan; dan
- 4) Diperolehnya suatu perubahan rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah dengan melihat sumber daya yang ada.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Bab ini berisi penjelasan hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Perangkat Daerah tahun berjalan sampai dengan triwulan kedua, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta hasil review terhadap RKPD perubahan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan, yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra PD dan RPJMD.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Rancangan Akhir Perubahan Renja atau disering disebut Renja Perubahan adalah tahapan akhir penyusunan dokumen Renja Perubahan yang dilaksanakan setelah OPD menyusun Rancangan perubahan Renja menjadi Rancangan akhir perubahan Renja berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan RKPD yang disebutkan Pasal 363 Ayat (1) Permendagri 86 tahun Tahun 2017. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan Renja PD sesuai dengan pasal 361 ayat 2 meliputi : a) Analisis gambaran pelayanan PD; b) Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II Tahun Berjalan; dan c) Penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.

2.1. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah daerah mengenai urusan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan lingkungan hidup berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dijelaskan diatas, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup;

- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang pekerjaan umum, penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pengukuran kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya telah ditentukan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, dimana untuk tahun berjalan ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 2.1.
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023

No	IKU	Satuan	Target Tahun 2023	Ket
1	2	3	4	5
1	Nilai Reformasi Birokrasi PD	Poin	56	
2	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Poin	0,562	
3	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	69,99	
4	Cakupan ketersediaan bangunan pemerintahan dan fasilitas pendukungnya yang layak difungsikan	Persen	56,27	
5	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	33,38	
6	Persentase penduduk berakses air minum	Persen	66,42	
7	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	Persen	49,81	
8	Rasio rumah layak huni	Poin	0,5237	

No	IKU	Satuan	Target Tahun 2023	Ket
1	2	3	4	5
9	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU pada kurun waktu tertentu	Persen	52,39	
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	64,88	
11	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	9,82	

Gambaran capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah sampai dengan periode Renstra tahun sebelumnya dan proyeksi capaian kinerja pada tahun berjalan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2.
(Tabel T. C-30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Tasikmalaya sd. Tahun 2022

No	IKU	SPM/ Standar Nasional	IKK	Satuan	Target		Capaian		Proyeksi Tahun 2023	Catatan Analisis
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Nilai Reformasi Birokrasi PD		√	Poin	25,12	53	25,12	45	56	Tidak tercapai
2	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik		√	Poin	0,496	0,511	0,512	0,542	0,562	Melebihi
3	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik		√	Persen	69,04	69,51	66,84	69,51	69,99	Tercapai
4	Cakupan ketersediaan pembangunan pemerintahan dan fasilitas pendukungnya yang layak difungsikan		√	Persen	47,31	51,04	47,67	51,40	56,27	Melebihi
5	Ketaatan terhadap RTRW		√	Persen	25,63	29,50	21,77	22,44	33,38	Tidak tercapai
6	Persentase penduduk berakses air minum	√	√	Persen	65,42	65,92	65,61	65,97	66,42	Melebihi
7	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	√	√	Persen	48,89	49,34	48,91	49,16	49,81	Tidak tercapai
8	Rasio rumah layak huni		√	Poin	0,2528	0,2533	0,2528	0,2533	0,5237	Tercapai

No	IKU	SPM/ Standar Nasional	IKK	Satuan	Target		Capaian		Proyeksi Tahun 2023	Catatan Analisis
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU pada kurun waktu tertentu		√	Persen	52,14	52,2	52,14	52,16	52,39	Tidak tercapai
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		√	Poin	64,68	64,78	67,62	64,83	64,88	Melebihi
11	Persentase jumlah sampah yang tertangani		√	Persen	6,79	8,24	8	9,05	9,82	Melebihi

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II

Bab ini memuat kajian (reviu) terhadap hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada tahun berjalan sampai dengan triwulan II, yang disajikan pada Tabel 2.3. di bawah ini.

Tabel 2.3.
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun Berjalan sd. Triwulan II

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)		Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
		Indikator	Satuan			
1	2	3		4	5	6 = 5/4*100
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Poin	73,12	73,12	100
		IKM	Persen	82,86	82,66	99,76
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Sesuai Ketentuan	Dok	24	2	8,33
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	2	0	0
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lap	4	2	50
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Administrasi Keuangan Sesuai Kebutuhan	Bulan	12	6	50

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)		Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
		Indikator	Satuan			
1	2	3		4	5	6 = 5/4*100
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	2142	1216	56,77
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Sesuai Kebutuhan	Bulan	12	6	50
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	36	12	33,33
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	24	12	50
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dok	36	18	50
1.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lap	12	6	50
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	12	0	0
1.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dok	1	0	0
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai kebutuhan	Bulan	12	6	50
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	1	25
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Sesuai Kebutuhan	Bulan	12	6	50
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap	12	6	50
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lap	1	0	0
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lap	12	6	50

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)		Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
		Indikator	Satuan			
1	2	3		4	5	6 = 5/4*100
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sesuai Kebutuhan	Bulan	12	6	50
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	55	31	56,36
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	25	9	36
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	2	50
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	2	1	50
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Cakupan Areal Daerah Irigasi (<1000 Ha) yang Terlayani	Ha	40599,24	0	0
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas Baku Daerah Irigasi yang Terlayani	Ha	40399,24	0	0
1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Dok	19	0	0
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi	Km	11	2,09	19
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Dengan Jaringan Perpipaan	%	20,04	0	0
		Persentase Penduduk Berakses Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan	%	46,39	0	0
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk yang telah mendapatkan akses air minum yang aman	Jiwa	1198118	0	0
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	SR	577,33	0	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)		Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
		Indikator	Satuan			
1	2	3		4	5	6 = 5/4*100
1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perdesaan atau SPAM Tematik Tertentu	SR	312	0	0
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Ketersediaan Infrastruktur TPS3R	%	25,64	0	0
		Persentase Ketersediaan Infrastruktur TPA	%	0	0	0
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur TPS3R dan Infrastruktur TPA yang telah terbangun	Unit	10	0	0
1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah fasilitas TPS-3R dan TPA yang dibangun	Unit	4	0	0
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tinggal Dengan Pengelolaan Skala Setempat	%	45,66	0	0
		Persentase Rumah Tinggal Dengan Pengelolaan Skala Terpusat	%	4,15	0	0
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tinggal yang telah berakses sanitasi	Rumah	251598	0	0
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pertambahan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga	58,00	0	0
1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Rumah Tangga	400	0	0
1.03.05.2.01.15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun	M ³ /Hari	25,00	3,13	12,50

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)		Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
		Indikator	Satuan			
1	2	3		4	5	6 = 5/4*100
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Ketersediaan Bangunan Pemerintahan yang Layak Difungsikan	%	53,49	0	0
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah bangunan pemerintahan yang telah dibangun	Unit	46	0	0
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Dok	85,00	70	82,35
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dok	4	0	0
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Ketersediaan fasilitas Pendukung Bangunan Pemerintahan	%	67,39	0,96	1,42
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas bangunan dan lingkungannya yang telah dibangun	Unit	186	169	90,86
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan	8	1	12,50
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Perentase Panjang Jalan dalam Kondisi baik	%	54,16	0	0
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	Km	705,89	0	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)		Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
		Indikator	Satuan			
1	2	3		4	5	6 = 5/4*100
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Dok	1	0	0
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	Km	70,60	11,61	16,44
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Km	9,97	5,94	59,61
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Km	8,00	0,27	3,38
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	M	25	0	0
1.03.10.2.01.20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	M	271,02	0	0
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Realisasi RTRW pada Struktur Ruang	%	30,77	0	0
		Realisasi RTRW pada Pola Ruang	%	36	0	0
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RTRW dan RDTR yang telah tersusun	Dok	4	0	0
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Dok	2	0	0
1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Dok	2	0	0
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Luas lahan yang telah dikeluarkan Informasi Peruntukan Ruang (IPR)-nya	Ha	467,81	0	0
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dok	1	0	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)		Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
		Indikator	Satuan			
1	2	3		4	5	6 = 5/4*100
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penanganan Rumah Terkena Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	%	100	0	0
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	Jumlah Laporan Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program yang terdata/ akan ditangani	Laporan	1	0	0
1.04.02.2.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dok	4	0	0
1.04.02.2.01.04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Dok	5	0	0
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang tertangani	Unit	130	0	0
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	50,00	0	0
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni Diluar Kawasan Kumuh	%	80,79	0	0
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Layak Huni Diluar Kawasan Kumuh	Unit	408187	0	0
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	700	0	0
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Jumlah Rumah yang terfasilitasi PSU	%	0,62	0	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)		Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
		Indikator	Satuan			
1	2	3		4	5	6 = 5/4*100
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Rumah yang Telah Terfasilitasi PSU	Unit	243699	0	0
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	6	0	0
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan pengelolaan LH	%	100	40	40
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS yang tersusun	Dok	6	0	0
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dok	1	0	0
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase lokasi titik pantau air dan udara yang mempunyai kriteria minimal baik	%	65	0	0
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Lap	11	0	0
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dok	1	0	0
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luas lahan RTH	%	0,77	0,40	52,00
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas lahan RTH yang dikembangkan	Ha	33,68	2,15	6,37
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	5,96	2,15	36,01
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kapasitas sampah yang terkelola di sumber	Kubik	110355	46900,88	42,50
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase ketersediaan infrastruktur persampahan yang sesuai kebutuhan daerah	%	44,44	21,09	47,45

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)		Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
		Indikator	Satuan			
1	2	3		4	5	6 = 5/4*100
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPAKabupaten/ Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton	110355	55177,50	50
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam pengelolaan Bank Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	5	0	0

Sedangkan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan IKU Tahun 2023 sampai dengan triwulan II pada tahun anggaran berjalan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun Berjalan sd. Triwulan II

No	IKU	Satuan	Target Renstra Tahun 2023	Capaian Kinerja sd Triw. II Tahun 2023	% Capaian Kinerja sd Triw. II Tahun 2023	Catatan Analisis
1	2	3	4	5	6	7
1	Nilai Reformasi Birokrasi PD	Poin	56	45	80,36%	IKU OPD telah Dilaksanakan
2	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Poin	0,562	0,542	96,50%	IKU OPD telah Dilaksanakan
3	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	69,99	69,51	99,31%	IKU OPD telah Dilaksanakan
4	Cakupan ketersediaan bangunan pemerintahan dan fasilitas pendukungnya yang layak difungsikan	Persen	56,27	51,54	91,59%	IKU OPD telah Dilaksanakan
5	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	33,38	22,44	67,23%	IKU OPD telah Dilaksanakan
6	Persentase penduduk berakses air minum	Persen	66,42	65,97	99,32%	IKU OPD telah Dilaksanakan
7	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	Persen	49,81	49,16	98,70%	IKU OPD telah Dilaksanakan
8	Rasio rumah layak huni	Poin	0,2537	0,2535	99,92%	IKU OPD telah Dilaksanakan
9	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU pada kurun waktu tertentu	Persen	52,39	52,16	99,56%	IKU OPD telah Dilaksanakan
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	64,88	68,43	105,47%	IKU OPD telah Dilaksanakan
11	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	9,82	9,05	92,16%	IKU OPD telah Dilaksanakan

2.3. Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, karena dampaknya yang signifikan bagi kinerja perangkat daerah dan bagi Daerah, dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 menjadi dinamika dalam pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran 2023 yang berdampak terhadap ketidaksesuaian perencanaan dengan penganggaran. Antisipasi terhadap regulasi penganggaran merupakan salah satu hal kritis yang harus direspon dalam penyusunan Perubahan Renja PD Tahun Anggaran 2023 ini.

Hal kritis lainnya yang harus direspon dan berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas, diantaranya adalah pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar (SPM) bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan rakyat yang pencapaian kinerjanya masih dianggap rendah dan sarana prasarana pendukung Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Nangkaleah.

Permasalahan dan hambatan

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya antara lain sebagai berikut:

- 1) database kondisi jalan dan jembatan serta jaringan irigasi belum ter-update secara berkala dan perlu ditinjau kembali untuk dasar penentuan lokasi prioritas;
- 2) keterlambatan proses persiapan pekerjaan untuk pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar (SPM) bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan rakyat;
- 3) belum tersedianya lahan dan sarana prasarana untuk Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

Dampak terhadap pencapaian Visi Misi Kepala Daerah

Dampak yang timbul dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut di atas terhadap pencapaian Visi dan Misi

Kepala Daerah, diantaranya adalah:

- 1) rendahnya tingkat kemantapan jalan kewenangan Kabupaten Tasikmalaya dikarenakan sulitnya mendapatkan bantuan pendanaan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi;
- 2) belum optimalnya penyediaan air bersih dan penanganan air limbah (sanitasi) di kawasan permukiman kumuh;
- 3) masih tingginya volume timbunan sampah di TPA sehingga pengelolaan persampahan masih dianggap belum optimal.

Tantangan dan Peluang

Tantangan utama penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2023 adalah menjawab hal-hal kritis yang harus direspon serta mengatasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi selama penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas pada tahun pada tahun berjalan. Sedangkan yang dianggap sebagai peluang, diantaranya adalah:

- 1) peningkatan pembangunan infrastruktur ditetapkan menjadi program prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD dan RKPD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2023;
- 2) terbitnya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Percepatan Konektivitas Jalan Daerah untuk pengusulan ruas jalan penghubung perbatasan jalan Nasional;
- 3) adanya perhatian dari Pemerintah Pusat untuk peningkatan pengelolaan persampahan di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Nangkaleh.

Formulasi Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi DPUURLH Kabupaten Tasikmalaya

1. Fokus pembangunan infrastruktur pada penyelenggaraan jalan dan jembatan kewenangan Kabupaten melalui rekonstruksi, pemeliharaan berkala dan rutin jalan serta pemeliharaan berkala jembatan;
2. Penentuan kegiatan prioritas berdasarkan ketentuan Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya;

3. Peningkatan sarana dan prasarana TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) di TPA Nangkaleah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Renja dilakukan dengan membandingkan kinerja pencapaian target Renja Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya pada tahun berjalan, dengan kondisi, permasalahan hingga isu penting yang berkembang yang memerlukan penyesuaian melalui program dan kegiatan serta pagu indikatif pada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya yang mengacu pada Perubahan RKPD tahun berjalan.

Perubahan Renja dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya disajikan pada Tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1
RINCIAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU
PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN BERJALAN
DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TASIKMALAYA

KODE	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ SUBKEGIATAN (<i>SUB OUTPUT</i>)	SATU AN	TARGET		PAGU			KE T
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Poin	82,86	82,86	17.185.148.047	15.514.277.239	1.670.870.808	
		IKM	Persen	72,62	72,62	8.222.163.050	6.403.607.050	1.818.556.000	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Sesuai Ketentuan	Dok	24	24	80.000.000	80.000.000	0	
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	2	3	60.000.000	60.000.000	0	
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lap	4	8	20.000.000	20.000.000	0	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Administrasi Keuangan Sesuai Kebutuhan	Bulan	2268	2268	17.105.148.047	15.434.277.239	1.670.870.808	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	2268	2268	17.105.148.047	15.434.277.239	1.670.870.808	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Sesuai Kebutuhan	Bulan			575.000.000	575.000.000	0	
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	36	36	115.000.000	115.000.000	0	
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	24	24	65.000.000	65.000.000	0	

KODE	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)/ SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATU AN	TARGET		PAGU			KE T
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dok	12	12	35.000.000	35.000.000	0	
1.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lap	12	12	40.000.000	40.000.000	0	
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	12	12	120.000.000	120.000.000	0	
1.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dok	1	1	200.000.000	200.000.000	0	
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai kebutuhan	Bulan	12	12	2.023.556.000	205.000.000	1.818.556.000	
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	3	2.023.556.000	205.000.000	1.818.556.000	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Sesuai Kebutuhan	Bulan	12	12	3.828.149.450	3.828.149.450	0	
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap	12	12	503.449.450	503.449.450	0	
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lap	1	1	20.000.000	20.000.000	0	
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lap	12	12	3.304.700.000	3.304.700.000	0	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sesuai Kebutuhan	Bulan	12	12	1.795.457.600	1.795.457.600	0	

KODE	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)/ SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATU AN	TARGET		PAGU			KE T
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	45	45	1.320.457.600	1.320.457.600	0	
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	14	14	100.000.000	100.000.000	0	
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	1	75.000.000	75.000.000	0	
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	300.000.000	300.000.000	0	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Cakupan Areal Daerah Irigasi (<1000 Ha) yang Terlayani	Ha	40599,24	40599,24	15.773.425.000	40.906.425.000	-25.133.000.000	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas Baku Daerah Irigasi yang Terlayani	Ha	40599,24	40599,24	15.773.425.000	40.906.425.000	-25.133.000.000	
1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Dok	8	8	100.000.000	100.000.000	0	
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi	Km	19.78	28.189	15.673.425.000	40.806.425.000	-25.133.000.000	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Dengan Jaringan Perpipaan	%	46,39	46,39	15.313.403.000	16.313.403.000	-1.000.000.000	
		Persentase Penduduk Berakses Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan	%	20,04	20,04			0	

KODE	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)/ SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATU AN	TARGET		PAGU			KE T
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk yang telah mendapatkan akses air minum yang aman	Jiwa	1198118	1198118	15.313.403.000	16.313.403.000	-1.000.000.000	
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	SR	892	892	10.675.450.000	12.040.450.000	-1.365.000.000	
1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perdesaan atau SPAM Tematik Tertentu	SR	312	312	4.637.953.000	4.272.953.000	365.000.000	
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Ketersediaan Infrastruktur TPS3R	%	25	25	3.010.727.000	5.510.727.000	-2.500.000.000	
		Persentase Ketersediaan Infrastruktur TPA	%	25,64	25,64	0	0	0	
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur TPS3R dan Infrastruktur TPA yang telah terbangun	Unit	11	11	3.010.727.000	5.510.727.000	-2.500.000.000	
1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah fasilitas TPS-3R dan TPA yang dibangun	Unit	8	8	3.010.727.000	5.510.727.000	-2.500.000.000	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tinggal Dengan Pengelolaan Skala Setempat	%	45,66	45,66	6.080.000.000	13.205.000.000	-7.125.000.000	
		Persentase Rumah Tinggal Dengan Pengelolaan Skala Terpusat	%	4,15	4,15	11.970.800.000	12.670.800.000	-700.000.000	

KODE	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)/ SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATU AN	TARGET		PAGU			KE T
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tinggal yang telah berakses sanitasi	Rumah	251.598	251.598	18.050.800.000	25.875.800.000	-7.825.000.000	
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Rumah Tangga	58	58	6.080.000.000	13.205.000.000	-7.125.000.000	
1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga	600	600	5.020.800.000	5.120.800.000	-100.000.000	
1.03.05.2.01.15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun	M ³ /Hari	50	50	6.950.000.000	7.550.000.000	-600.000.000	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Ketersediaan Bangunan Pemerintahan yang Layak Difungsikan	%	53,49	53,49	850.000.000	850.000.000	0	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah bangunan pemerintahan yang telah dibangun	Unit	46	46	850.000.000	850.000.000	0	
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Dok	85	85	400.000.000	400.000.000	0	

KODE	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)/ SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATU AN	TARGET		PAGU			KE T
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dok	10	10	450.000.000	450.000.000	0	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Ketersediaan fasilitas Pendukung Bangunan Pemerintahan	%	67,39	67,39	19.543.866.550	5.716.941.799	13.826.924.751	
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas bangunan dan lingkungannya yang telah dibangun	Unit	186	186	19.543.866.550	5.716.941.799	13.826.924.751	
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan	6	6	19.543.866.550	5.716.941.799	13.826.924.751	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Perentase Panjang Jalan dalam Kondisi baik	%	52,54	52,54	26.440.500.000	74.780.500.000	-48.340.000.000	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	Km			26.440.500.000	74.780.500.000	-48.340.000.000	
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Dok	3	3	200.000.000	200.000.000	0	
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	Km	14.98	14.98	13.120.000.000	38.820.000.000	-25.700.000.000	
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Km	12.55	12.55	10.620.500.000	9.310.500.000	1.310.000.000	
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Km	56	56	900.000.000	900.000.000	0	

KODE	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)/ SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATU AN	TARGET		PAGU			KE T
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	M	200	200	0	23.000.000.000	-23.000.000.000	
1.03.10.2.01.20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	M	271.02	271.02	1.600.000.000	2.550.000.000	-950.000.000	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Realisasi RTRW pada Struktur Ruang	%	36	36	1.400.000.000	1.400.000.000	0	
		Realisasi RTRW pada Pola Ruang	%	30,77	30,77	100.000.000	100.000.000	0	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RTRW dan RDTR yang telah tersusun	Dok	3	3	1.400.000.000	1.400.000.000	0	
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Dok	2	2	1.200.000.000	1.200.000.000	0	
1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Dok	2	2	200.000.000	200.000.000	0	
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Luas lahan yang telah dikeluarkan Informasi Peruntukan Ruang (IPR)-nya	Ha			100.000.000	100.000.000	0	
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dok	1	1	100.000.000	100.000.000	0	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penanganan Rumah Terkena Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	%	100	100	150.000.000	150.000.000	0	

KODE	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)/ SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATU AN	TARGET		PAGU			KE T
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	Jumlah Laporan Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program yang terdata/ akan ditangani	Laporan	1	1	50.000.000	50.000.000	0	
1.04.02.2.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dok	4	4	25.000.000	25.000.000	0	
1.04.02.2.01.04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Dok	5	5	25.000.000	25.000.000	0	
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang tertangani	Unit	130	130	100.000.000	100.000.000	0	
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	50	50	100.000.000	100.000.000	0	
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni Diluar Kawasan Kumuh	%	80,79	80,79	3.763.000.000	1.280.000.000	2.483.000.000	
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Layak Huni Diluar Kawasan Kumuh	Unit	408187	408187	3.763.000.000	1.280.000.000	2.483.000.000	
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	638	638	3.763.000.000	1.280.000.000	2.483.000.000	

KODE	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)/ SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATU AN	TARGET		PAGU			KE T
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Jumlah Rumah yang terfasilitasi PSU	%	0,62	0,62	255.000.000	0	255.000.000	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Rumah yang Telah Terfasilitasi PSU	Unit	243699	0	255.000.000	0	255.000.000	
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	6	0	255.000.000	0	255.000.000	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyelarasan dokumen perencanaan pembangunan dengan pengelolaan LH	%	100	100	500.000.000	500.000.000	0	
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS yang tersusun	Dok	6	6	500.000.000	500.000.000	0	
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dok	1	1	500.000.000	500.000.000	0	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase lokasi titik pantau air dan udara yang mempunyai kriteria minimal baik	%	65	65	200.000.000	200.000.000	0	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Lap	11	11	200.000.000	200.000.000	0	
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dok	1	1	200.000.000	200.000.000	0	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luas lahan RTH	%	0,77	0,77	200.345.000	200.345.000	0	

KODE	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ SUBKEGIATAN (<i>SUB OUTPUT</i>)	SATU AN	TARGET		PAGU			KE T
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas lahan RTH yang dikembangkan	Ha	33,68	33,68	200.345.000	200.345.000	0	
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	5,96	5,96	200.345.000	200.345.000	0	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kapasitas sampah yang terkelola di sumber	Kubik	110355	110355	1.781.262.400	3.599.818.400	-1.818.556.000	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase ketersediaan infrastruktur persampahan yang sesuai kebutuhan daerah	%	44,44	44,44	1.781.262.400	3.599.818.400	-1.818.556.000	
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton	38808	38808	1.131.262.400	2.949.818.400	-1.818.556.000	
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam pengelolaan Bank Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	5	5	650.000.000	650.000.000	0	
TOTAL *)						132.739.640.047	199.301.844.488	(66.562.204.441)	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya untuk Tahun 2023.

Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya adalah menyelenggarakan pelayanan dasar urusan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat serta pembangunan infrastruktur wilayah yang dalam pelaksanaannya selalu mengutamakan koordinasi secara lintas sektor dan lintas daerah baik antar kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat dengan berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran.

Dalam rangka menjamin terlaksananya prioritas pembangunan daerah tersebut yang diuraikan ke dalam berbagai program dan kegiatan dengan diperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- 1) Dokumen Perubahan Renja Tahun 2023 harus dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA-P) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2023 yang merupakan hasil kesepakatan bersama pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dengan DPRD Kabupaten Tasikmalaya;

- 2) Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023, berlaku sejak ditetapkan sampai dengan Tanggal 31 Desember 2023.

Demikian Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 disusun sebagai penyesuaian dari Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang akan melandasi penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023.

Tasikmalaya, Juli 2023
Kepala Dinas PUTRLH
Kabupaten Tasikmalaya

M FUAD ABDUL AZIZ S.T, M.P
Pembina Tk.I -IV/b
NIP. 19660704 199303 1 004